



SOAL KEBIJAKAN DANA BOS NON TUNAI

Sekolah Tak Kebingungan, Imbangi Sosialisasi

YOGYA (KR)- Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) soal transaksi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menggunakan model non tunai, sebenarnya cukup bagus. Tidak hanya karena pengawasan lebih mudah untuk dilakukan, namun peruntukannya menjadi lebih transparan. Supaya kebijakan tersebut tidak membingungkan dalam pelaksanaan di lapangan, sekolah berharap bisa segera disosialisasikan. Sosialisasi itu penting, karena kondisi SDM di sekolah cukup beragam.

"Seandainya boleh berharap saya ingin agar kebijakan transaksi BOS dengan model non tunai ini diterapkan secara bertahap. Namun kalau kebijakan itu sudah menjadi keputusan pusat, sekolah siap untuk melaksanakannya. Konsekuensi dari itu, perlu segera diimbangi dengan sosialisasi. Jangan sampai kebijakan tersebut sudah diterapkan, tapi SDM di sekolah belum siap," kata Kepala SD Muhammadiyah Bausaran, Suwarjo MPd kepada KR di Yogyakarta, Jumat (15/12).

Suwarjo mengatakan, keberadaan dana BOS sangat berarti untuk mendukung kegiatan operasional di sekolah. Oleh karena itu, seandainya ada kebijakan baru berkaitan dengan dana BOS, sebaiknya segera disosialisasikan ke sekolah. Jangan sampai karena keterbatasan informasi, sekolah menjadi kesulitan yang berdampak pada keterlambatan laporan terkait dengan dana BOS. Pasalnya jika hal itu sampai terjadi, dikhawatirkan akan berdampak pada layanan pendidikan bagi siswa.

"Kalau boleh jujur saya lebih senang jika kebijakan transaksi dana BOS secara non tunai diterapkan secara bertahap, seperti yang diharapkan oleh Disdikpora DIY. Kondisi SDM di sekolah yang cukup beragam menjadi salah satu pertimbangan dari adanya kebijakan baru ini," ungkap Suwarjo.

Sementara Waka Kurikulum SMPN 14 Yogyakarta R Hargo Budisantoso SPd berpendapat, dana BOS turun non tunai memberi rasa aman kepada bendahara sekolah karena tidak memegang uang. Dana baru bisa cairkan jika sudah ada SPJ. Jadi SPJ dibuat dulu baru proyek berjalan. Maka bagi rekanan yang akan mengerjakannya harus punya modal untuk membiayai sendiri terlebih dahulu. Baru setelah pekerjaan selesai, SPJ selesai, uang dibayarkan.

Tetapi menurut Hargo, dengan cara seperti itu, di lapangan kadang ada kendala yang tidak sesuai dengan rencana. Maka perlu ada tim yang mencermati. Lebih repot lagi kalau ada kerusakan kecil, atau hal-hal insidental. "Engsel pintu rusak misalnya atau mendadak ada kunjungan tamu yang jumlahnya banyak. Itu tidak bisa dibuat SPJ, sekolah masih mencari cara bagaimana mengatasinya,"ujarnya.

Terpisah Kepala SMPN 11 Yogyakarta, Drs Sukirno SH menambahkan, Dana BOS non tunai, sekolah aman karena tidak memegang uang. Rekanan yang akan mengerjakan pekerjaan harus memodali dulu pekerjaannya. Karena SPJ baru bisa dibuat setelah pekerjaan selesai. Hanya rekanan yang punya modal yang bisa melaksanakan tugas tersebut.

Keuntungan lain rekanan akan mengerjakan pekerjaan tepat waktu, supaya segera dibayar. Rekanan yang bermodal terbatas menjadi tidak bisa ikut bermain. (RiaWar)-e

Instansi

1. **Din. Pendidikan**

2.

3.

4.

5.

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005